



Judul : Antisipasi Geopolitik Global, KLHK Cadangkan Dana Rp. 458 M
Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Antisipasi Geopolitik Global KLHK Cadangkan Dana Rp 458 Miliar

GEJOLAK geopolitik global dan tekanan ekonomi di pertengahan tahun ini diprediksi akan berdampak terhadap kondisi lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil kebijakan *automatic adjustment* atau pencadangan anggaran untuk menghadapi kondisi tersebut.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, kebijakan *automatic adjustment* sudah disepakati. Kebijakan ini berlaku berdasarkan surat dari Menteri Keuangan pada 9 Desember 2022 dengan porsi Rp 458,60 miliar atau sekitar 6,63 persen dari pagu alokasi anggaran Kementerian LHK.

Komposisi anggaran itu diambil dari belanja pegawai, belanja barang dan juga dari belanja modal.

"Kebijakan pencadangan tersebut meminta seluruh kementerian maupun lembaga agar memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun," ujarnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, kemarin.

Melalui kebijakan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Siti mengatakan, proses pencadangan anggaran tersebut sudah berproses beberapa kali melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dalam bimbingan Komisi IV DPR.

Menurutnya, KLHK tetap memegang komitmen bahwa pencadangan anggaran yang disusun tersebut sudah dipertimbangkan secara matang.

Dengan begitu, tidak akan

mengganggu program-program kerja berbasis masyarakat yang bernilai Rp 1,67 triliun tahun ini.

"Seperti laporan kami bahwa *automatic adjustment* ini tetap dalam posisi KLHK berkomitmen tetap menjaga dari kegiatan berbasis masyarakat," tegas Siti.

Pada 2023, KLHK telah berkomitmen untuk menyalurkan dana kegiatan berbasis masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 1,67 triliun dengan efektivitas penyalurannya diberikan kepada 327 kabupaten maupun kota terpilih mulai Maret 2023.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini mengatakan, legislator telah menyetujui kebijakan pencadangan anggaran yang KLHK tersebut.

"Komisi IV DPR menyetujui *automatic adjustment* anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp 458,60 miliar," kata Anggia.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanti menambahkan, jika menilik kondisi global tantangan pengendalian perubahan iklim menjadi cukup berat karena terpengaruh berbagai krisis. Terutama, akibat konflik geopolitik global.

"Di tengah kondisi yang kurang baik tersebut Indonesia tetap dapat menunjukkan komitmen globalnya melalui contoh-contoh nyata (*leading by examples*) dalam mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan ambisi iklim," katanya.

Dia menuturkan, Indonesia memiliki komitmen global dalam menurunkan emisi juga diimplementasikan secara lokal di tingkat tapak dengan melibatkan masyarakat. ■ JAR